



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 003 /OT.05/K.JI-08/03/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang merupakan alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2022;
- KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 24 Maret 2022



AHMAD UDI MASJKUR, M. Pd. I
KETUA

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Jombang
Nomor : 003 /OT.05/K.JI-08/03/2022
Tanggal : 24 Maret 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Tim Pengarah		
1	Ahmad Udi Masjkur, M. Pd. I	Ketua Bawaslu Kab. Jombang	Pengarah
2	Khudrotun Nafisah, M. Si	Anggota Bawaslu Kab. Jombang.	Pengarah
3	Dafid Budiyanto, S. IP	Anggota Bawaslu Kab. Jombang	Pengarah
4	Achmad Zani, S. IP	Anggota Bawaslu Kab. Jombang	Pengarah
5	Farwis, S. Sos	Anggota Bawaslu Kab. Jombang	Pengarah
II	Tim Pelaksana		
1	Purwanto, S. IP., M. Si	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Sare Bambang Sulaiman	Staf Sub Bagian Hukum	Ketua
3	Hery Poncosilo	Staf Sub Administrasi	Wakil Ketua
A	Tim Pelaksana Managemen Perubahan		
1	Yeni Astutik	Staf Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Koordinator
2	Neny Mulandari	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
3	Ayu Fitriyah Ningsih	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
B	Tim Pelaksana Deregulasi Kebijakan		
4	Sare Bambang Sulaiman	Staf Sub Bagian Hukum	Koordinator
5	Vivi Lestari	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
6	Fatichul Ilmi	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
C	Tim Pelaksana Penataan dan Penguatan Organisasi		
7	Yulia Ika Sulistyaningsih	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran	Koordinator
8	Kukuh Berlian Yuda Asmara	Staf Sub Bagian Humas dan Datin	Anggota
9	Sare Bambang Sulaiman	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
D	Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana		
10	Kukuh Berlian Yuda Asmara	Staf Sub Bagian Humas dan Datin	Koordinator
11	Neny Mulandari	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
12	Fatichul Ilmi	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
E	Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM		
13	Neny Mulandari	Staf Sub Bagian Administrasi	Koordinator
14	Vivi Lestari	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
15	Ayu Fitriyah Ningsih	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
F	Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan		
16	Fatichul Ilmi	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Koordinator
17	Kukuh Berlian Yuda Asmara	Staf Sub Bagian Humas dan Datin	Anggota
18	Sare Bambang Sulaiman	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota

G	Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
	19	Vivi Lestari	Staf Sub Bagian Administrasi
	20	Yeni Astutik	Staf Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
	21	Yulia Ika Sulistyaningsih	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran
H	Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	22	Ayu Fitriyah Ningsih	Staf Sub Bagian Administrasi
	23	Yeni Astutik	Staf Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
	24	Yulia Ika Sulistyaningsih	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran



ANMAD UDI MASJKUR, M. Pd. I